

Integrasi digital risk management dan sharia compliance dalam perbankan syariah : Strategi mitigasi risiko di era disrupsi teknologi keuangan

Fiqrotun Nabila

Program Studi Perbankan syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 230503110121@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Manajemen risiko syariah, fintech, transformasi digital, ekonomi digital, keuangan syariah.

Keywords:

Islamic risk management, fintech, digital transformation, digital economy, islamic finance.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam industri perbankan syariah, khususnya dalam aspek manajemen risiko yang semakin kompleks dan multidimensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi digital risk management dan sharia compliance sebagai strategi mitigasi risiko yang efektif di tengah disrupsi teknologi keuangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dari jurnal ilmiah bereputasi, regulasi resmi, serta publikasi akademik relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses layanan, dan mempercepat proses transaksi,

namun di sisi lain juga memunculkan risiko baru seperti cyber risk, data breach, dan fraud berbasis teknologi. Selain itu, perbankan syariah memiliki karakteristik unik berupa kewajiban kepatuhan terhadap prinsip syariah yang memunculkan risiko tambahan berupa sharia compliance risk yang berdampak pada reputasi dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan model manajemen risiko yang terintegrasi dan adaptif untuk mengelola risiko konvensional, digital, dan syariah secara simultan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa integrasi kedua aspek tersebut mampu meningkatkan efektivitas mitigasi risiko, menjaga stabilitas operasional, serta memperkuat daya saing perbankan syariah di era digital.

ABSTRACT

The digital transformation in the financial sector has significantly impacted Islamic financial institutions, particularly in risk management practices. This study aims to analyze the role of fintech in enhancing the effectiveness of risk management and to identify challenges faced in the digital economy era. The method used is a literature review by examining various relevant academic journals. The findings indicate that technologies such as artificial intelligence, big data, and blockchain improve risk analysis accuracy, operational efficiency, and transaction transparency. However, this transformation also introduces new risks, including cybersecurity risk, operational risk, and sharia compliance risk. Therefore, it is necessary to strengthen technology-based risk management strategies, supported by adaptive regulations and stakeholder collaboration. In conclusion, the transformation of risk management is essential to enhance the competitiveness and sustainability of Islamic financial institutions in the fintech and digital economy era.

Pendahuluan

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan ini didorong oleh kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah serta dukungan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

regulasi dari pemerintah dan otoritas keuangan. Perbankan syariah memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui fungsi intermediasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun demikian, dalam operasionalnya, bank syariah dihadapkan pada berbagai jenis risiko yang kompleks, seperti risiko pembiayaan, likuiditas, operasional, hingga risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah (Sudarmanto et al., 2024).

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, sektor perbankan syariah juga mengalami transformasi signifikan melalui digitalisasi layanan keuangan. Inovasi seperti mobile banking, internet banking, dan integrasi dengan financial technology (fintech) telah meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan. Namun, digitalisasi juga memunculkan jenis risiko baru yang dikenal sebagai digital risk, seperti risiko keamanan siber (cyber risk), kebocoran data, dan fraud berbasis teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya membawa peluang, tetapi juga tantangan baru dalam pengelolaan risiko pada perbankan syariah (Susanti, 2024).

Karakteristik unik perbankan syariah terletak pada kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi dan operasionalnya. Hal ini menimbulkan risiko tambahan yang dikenal sebagai sharia compliance risk, yaitu risiko akibat ketidaksesuaian dengan ketentuan syariah. Risiko ini tidak hanya berdampak pada aspek keuangan, tetapi juga berpengaruh terhadap reputasi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, manajemen risiko dalam perbankan syariah harus mampu mengakomodasi aspek kepatuhan syariah secara menyeluruh.

Implementasi manajemen risiko dalam perbankan syariah telah diatur oleh berbagai regulasi, baik nasional maupun internasional. Namun dalam praktiknya, masih terdapat kendala dalam mengintegrasikan risiko konvensional dengan risiko digital dan risiko syariah secara bersamaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem manajemen risiko yang ada perlu dikembangkan menjadi lebih adaptif dan komprehensif, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat (Rahmawati & Nisa, 2024).

Fenomena meningkatnya penggunaan layanan digital dalam perbankan, khususnya di kalangan generasi Z, menunjukkan bahwa kemudahan akses, efisiensi layanan, serta tingkat kepercayaan terhadap sistem menjadi faktor penting dalam mendorong adopsi digital banking syariah. Namun, di balik perkembangan tersebut, muncul tantangan baru berupa meningkatnya ancaman keamanan siber dan risiko operasional yang harus diantisipasi secara serius oleh lembaga perbankan. Kondisi ini menuntut adanya pengelolaan risiko digital yang matang agar kepercayaan nasabah tetap terjaga dan stabilitas sistem keuangan tidak terganggu (Maghfiro & Budianto, 2024).

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan baru dalam manajemen risiko yang mampu mengintegrasikan aspek digital risk management dengan sharia compliance. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi solusi strategis dalam menghadapi risiko multidimensional di era disrupsi teknologi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji integrasi kedua aspek tersebut dalam perbankan syariah guna meningkatkan efektivitas mitigasi risiko serta daya saing industri di masa depan.

Pembahasan

Perkembangan manajemen risiko dalam perbankan syariah tidak dapat dilepaskan dari dinamika perubahan lingkungan bisnis, khususnya akibat digitalisasi sektor keuangan. Transformasi digital telah mendorong bank syariah untuk meningkatkan efisiensi operasional serta memperluas jangkauan layanan. Namun, di sisi lain, transformasi ini juga meningkatkan kompleksitas risiko yang dihadapi, terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi dan keamanan data. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan manajemen risiko yang tidak hanya konvensional, tetapi juga mampu mengakomodasi risiko berbasis digital dan prinsip syariah secara bersamaan.

Konsep Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah

Manajemen risiko dalam perbankan syariah merupakan suatu proses sistematis yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Berbeda dengan bank konvensional, perbankan syariah memiliki karakteristik tambahan berupa kepatuhan terhadap prinsip syariah, sehingga jenis risiko yang dihadapi menjadi lebih kompleks. Risiko tersebut meliputi risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, serta risiko kepatuhan syariah.

Selain itu, perbankan syariah juga menghadapi risiko reputasi yang cukup tinggi, karena kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada konsistensi penerapan prinsip syariah. Ketidaksiapan dalam akad atau praktik yang tidak sesuai dengan syariah dapat menurunkan tingkat kepercayaan nasabah secara signifikan. Oleh karena itu, sistem manajemen risiko dalam bank syariah harus dirancang secara komprehensif dan terintegrasi (Rivanda, 2025).

Digital Risk dalam Perbankan Syariah

Digitalisasi dalam sektor perbankan telah melahirkan berbagai inovasi, seperti mobile banking, internet banking, dan integrasi dengan fintech. Inovasi ini memberikan kemudahan bagi nasabah, namun juga meningkatkan potensi risiko digital, seperti cyber risk, data breach, dan fraud berbasis teknologi. Risiko ini menjadi tantangan baru yang harus diantisipasi oleh perbankan syariah melalui penguatan sistem keamanan informasi dan tata kelola teknologi.

Digitalisasi dalam sektor perbankan telah melahirkan berbagai inovasi, seperti mobile banking, internet banking, dan integrasi dengan fintech. Inovasi ini memberikan kemudahan bagi nasabah, namun juga meningkatkan potensi risiko digital, seperti cyber risk, data breach, dan fraud berbasis teknologi. Risiko ini menjadi tantangan baru yang harus diantisipasi oleh perbankan syariah melalui penguatan sistem keamanan informasi dan tata kelola teknologi (Rahmawati & Nisa, 2024).

Sharia Compliance Risk dalam Perbankan Syariah

Sharia compliance risk merupakan risiko yang timbul akibat ketidaksiapan antara praktik operasional bank dengan prinsip-prinsip syariah. Risiko ini menjadi ciri khas utama dalam perbankan syariah dan tidak ditemukan dalam sistem perbankan konvensional. Implementasi prinsip syariah harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari akad, produk, hingga mekanisme operasional.

Penelitian yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menunjukkan bahwa penguatan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. DPS berperan sebagai pengawas sekaligus pemberi rekomendasi dalam menjaga kesesuaian operasional bank dengan fatwa yang berlaku. Dengan demikian, pengelolaan risiko syariah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat normatif dan etis (Akbar. C et al., 2022).

Integritas Digital Risk Management dan Sharia Compliance

Integrasi antara digital risk management dan sharia compliance merupakan suatu kebutuhan yang mendesak dalam menghadapi era disrupsi teknologi. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sistem manajemen risiko yang holistik, yang mampu mengakomodasi berbagai jenis risiko secara simultan. Integrasi ini dapat dilakukan melalui penguatan tata kelola perusahaan (good corporate governance), penerapan teknologi keamanan informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

menekankan bahwa efektivitas manajemen risiko dalam perbankan syariah sangat bergantung pada kemampuan institusi dalam mengintegrasikan berbagai jenis risiko ke dalam satu kerangka kerja yang terpadu. Hal ini mencakup penggunaan teknologi untuk mendukung proses monitoring risiko, serta penerapan prinsip syariah sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya integrasi tersebut, perbankan syariah diharapkan mampu meningkatkan ketahanan terhadap risiko serta memperkuat daya saing di tengah persaingan industri keuangan yang semakin ketat. Selain itu, integrasi ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.

Implikasi Praktis dan Tantangan Implementasi Integritas Risiko

Dalam menghadapi kompleksitas risiko di era digital, perbankan syariah memerlukan suatu model integrasi yang mampu mengakomodasi berbagai jenis risiko secara komprehensif. Model integrasi digital risk management dan sharia compliance pada dasarnya merupakan suatu kerangka kerja yang menggabungkan aspek teknologi, tata kelola, serta prinsip syariah dalam satu sistem yang terstruktur. Model ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara inovasi digital dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah.

Secara konseptual, model integrasi ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu identifikasi risiko, pengelolaan risiko, dan pengawasan risiko. Pada tahap identifikasi, bank syariah harus mampu mengenali seluruh potensi risiko yang muncul, baik risiko konvensional, risiko digital, maupun risiko kepatuhan syariah. Proses ini memerlukan dukungan teknologi informasi yang mampu mengumpulkan dan menganalisis data secara akurat dan cepat. Dengan demikian, potensi risiko dapat dideteksi sejak dini sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Tahap berikutnya adalah pengelolaan risiko, yang mencakup proses mitigasi dan pengendalian risiko. Dalam konteks ini, integrasi antara teknologi digital dan prinsip syariah menjadi sangat penting. Penggunaan sistem berbasis teknologi seperti automated risk assessment dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Namun, setiap keputusan yang diambil tetap harus mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip syariah, sehingga tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata.

Selanjutnya, tahap pengawasan risiko dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses manajemen risiko berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk manajemen internal, auditor, serta Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas bank tetap berada dalam koridor syariah. Selain itu, pengawasan berbasis teknologi juga dapat meningkatkan efektivitas monitoring melalui sistem pelaporan yang terintegrasi dan real-time. menyatakan bahwa keberhasilan penerapan manajemen risiko dalam perbankan syariah sangat bergantung pada integrasi antara sistem, manusia, dan regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa model integrasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat. Sementara itu, menambahkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam manajemen risiko harus diimbangi dengan sistem keamanan yang memadai guna mengurangi potensi ancaman siber.

Dengan adanya model integrasi ini, perbankan syariah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko secara menyeluruh. Model ini juga dapat menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan dan strategi manajemen risiko yang lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Selain itu, integrasi ini akan memperkuat daya saing perbankan syariah dalam menghadapi persaingan global di era digital. Sebagai implikasi praktis, model ini dapat diterapkan melalui pengembangan sistem manajemen risiko berbasis teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan peran lembaga pengawas. Dengan demikian, integrasi antara digital risk management dan sharia compliance tidak hanya menjadi konsep teoritis, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dalam operasional perbankan syariah.

Implementasi integrasi antara digital risk management dan sharia compliance dalam perbankan syariah tidak hanya memberikan manfaat strategis, tetapi juga menghadirkan berbagai implikasi praktis yang perlu diperhatikan. Secara praktis, integrasi ini mendorong perbankan syariah untuk melakukan transformasi menyeluruh, baik dari sisi sistem, proses bisnis, maupun sumber daya manusia. Bank syariah dituntut untuk mampu mengembangkan sistem manajemen risiko yang berbasis teknologi sekaligus tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Salah satu implikasi utama adalah perlunya investasi yang signifikan dalam infrastruktur teknologi informasi. Pengembangan sistem keamanan siber, risk management system, serta integrasi data membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun demikian, investasi ini menjadi penting untuk meminimalkan potensi kerugian akibat risiko digital, seperti kebocoran data dan serangan siber. Menegaskan bahwa kesiapan teknologi menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan risiko di era digital.

Selain itu, implikasi lainnya adalah kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi dan syariah. SDM yang memiliki pemahaman ganda ini menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa sistem yang dikembangkan tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu meningkatkan program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi karyawannya secara berkelanjutan. Namun demikian, dalam implementasinya terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial maupun

sumber daya manusia. Tidak semua bank syariah memiliki kapasitas yang sama dalam mengembangkan sistem berbasis teknologi yang canggih. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam penerapan manajemen risiko antar lembaga perbankan syariah.

Tantangan lainnya adalah kompleksitas dalam mengintegrasikan risiko digital dengan risiko kepatuhan syariah. Kedua jenis risiko ini memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda pula. Integrasi yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara inovasi teknologi dan kepatuhan syariah. Oleh karena itu, diperlukan kerangka kerja yang jelas dan komprehensif dalam mengelola kedua jenis risiko tersebut secara bersamaan. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat juga menjadi tantangan tersendiri. Bank syariah harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang terus berkembang, seperti penggunaan artificial intelligence, blockchain, dan teknologi finansial lainnya. Keterlambatan dalam beradaptasi dapat meningkatkan eksposur risiko dan menurunkan daya saing lembaga.

Meskipun demikian, integrasi antara digital risk management dan sharia compliance tetap memiliki prospek yang sangat positif. Dengan strategi yang tepat, perbankan syariah dapat memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan layanan, serta memperkuat kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, baik manajemen, regulator, maupun akademisi, untuk mendukung implementasi integrasi ini secara optimal.

Arah Pengembangan dan Inovasi Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Era Digital

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut perbankan syariah untuk terus berinovasi dalam mengelola risiko. Arah pengembangan manajemen risiko ke depan tidak hanya berfokus pada pendekatan konvensional, tetapi juga mengarah pada pemanfaatan teknologi canggih yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan risiko. Inovasi ini menjadi penting agar perbankan syariah dapat tetap relevan dan kompetitif di tengah persaingan industri keuangan yang semakin dinamis.

Salah satu arah pengembangan yang dapat dilakukan adalah penerapan teknologi artificial intelligence (AI) dalam sistem manajemen risiko. AI dapat digunakan untuk menganalisis data dalam jumlah besar (big data) guna mengidentifikasi pola risiko yang sulit dideteksi secara manual. Dengan adanya teknologi ini, bank syariah dapat melakukan prediksi risiko secara lebih akurat dan mengambil langkah mitigasi secara lebih cepat. menyebutkan bahwa digitalisasi yang didukung oleh teknologi canggih dapat meningkatkan kemampuan bank dalam mendeteksi dan mengelola risiko secara proaktif (Fikriah et al., 2023).

Selain itu, teknologi blockchain juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi dalam perbankan syariah. Dengan sistem yang terdesentralisasi, blockchain dapat meminimalkan risiko manipulasi data serta meningkatkan kepercayaan nasabah. Teknologi ini juga dapat mendukung penerapan prinsip syariah, khususnya dalam hal transparansi akad dan kejelasan transaksi, sehingga risiko kepatuhan syariah dapat diminimalkan.

Arah pengembangan lainnya adalah penguatan integrasi antara sistem manajemen risiko dengan kebijakan regulator. Regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi kunci dalam mendukung inovasi di sektor perbankan

syariah. Dalam hal ini, peran regulator sangat penting dalam menyediakan kerangka hukum yang jelas dan fleksibel, sehingga bank syariah dapat mengembangkan inovasi tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. menegaskan bahwa dukungan regulasi yang kuat akan meningkatkan efektivitas implementasi manajemen risiko dalam perbankan syariah

Di sisi lain, inovasi juga perlu didukung oleh peningkatan literasi keuangan dan digital masyarakat. Nasabah yang memiliki pemahaman yang baik terhadap layanan digital akan lebih mampu menghindari risiko, seperti penipuan atau penyalahgunaan data. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu aktif dalam melakukan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan layanan digital yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, kolaborasi antara perbankan syariah dengan institusi lain, seperti perusahaan fintech, lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian, juga menjadi salah satu strategi penting dalam pengembangan manajemen risiko. Kolaborasi ini dapat menghasilkan inovasi baru yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar, sekaligus memperkuat sistem manajemen risiko yang ada. Menekankan bahwa sinergi antar lembaga akan mempercepat pengembangan sistem manajemen risiko yang lebih efektif dan efisien.

Dengan berbagai arah pengembangan tersebut, perbankan syariah diharapkan mampu menghadapi tantangan risiko di era digital dengan lebih baik. Inovasi yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kinerja keuangan, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai syariah sebagai landasan utama operasional. Dengan demikian, perbankan syariah dapat menjadi sistem keuangan yang tidak hanya stabil, tetapi juga berkelanjutan dan berkeadilan.

Peran Regulasi dan Penguatan Kelembagaan dalam Integritas Manajemen Risiko

Dalam upaya mengoptimalkan integrasi antara digital risk management dan sharia compliance, peran regulasi dan penguatan kelembagaan menjadi faktor yang sangat krusial. Regulasi berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur arah pengembangan industri perbankan syariah, sekaligus sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Tanpa adanya regulasi yang jelas dan adaptif, implementasi manajemen risiko yang terintegrasi akan sulit dilakukan secara optimal (Fachruddin, 2025).

Regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan terkait manajemen risiko perbankan syariah, termasuk dalam menghadapi tantangan digitalisasi. Kebijakan yang dikeluarkan harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian (prudential banking). Selain itu, regulasi juga harus mampu mengintegrasikan aspek kepatuhan syariah ke dalam sistem pengawasan yang lebih luas, sehingga tidak terjadi dualisme dalam penerapan aturan. Penguatan kelembagaan juga menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi. Lembaga internal seperti unit manajemen risiko, audit internal, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus memiliki koordinasi yang baik dalam menjalankan fungsi masing-masing. DPS, sebagai lembaga yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, perlu berperan lebih aktif dalam memberikan masukan terkait risiko digital yang dapat mempengaruhi kesesuaian syariah.

Selain itu, peningkatan kapasitas kelembagaan juga mencakup penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi. Penggunaan sistem pengawasan digital memungkinkan regulator dan pihak internal bank untuk melakukan monitoring secara real-time terhadap aktivitas operasional. Hal ini akan meningkatkan efektivitas pengawasan serta meminimalkan potensi terjadinya pelanggaran atau penyimpangan. menyatakan bahwa efektivitas manajemen risiko sangat dipengaruhi oleh kualitas regulasi dan kelembagaan yang ada. Regulasi yang kuat dan kelembagaan yang solid akan menciptakan sistem pengelolaan risiko yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Sementara itu, menambahkan bahwa dalam era digital, penguatan kelembagaan harus diiringi dengan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengawasan.

Di sisi lain, tantangan yang dihadapi dalam penguatan regulasi adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara inovasi dan stabilitas. Regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi, sementara regulasi yang terlalu longgar dapat meningkatkan risiko. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Dengan adanya regulasi yang mendukung serta kelembagaan yang kuat, integrasi antara digital risk management dan sharia compliance dapat berjalan secara optimal. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap stabilitas perbankan syariah, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperkuat posisi perbankan syariah dalam sistem keuangan nasional maupun global.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan perbankan syariah di era digital menghadapi tantangan risiko yang semakin kompleks dan multidimensional. Risiko yang dihadapi tidak hanya terbatas pada risiko konvensional seperti risiko pembiayaan, likuiditas, dan operasional, tetapi juga mencakup risiko digital yang muncul akibat perkembangan teknologi, seperti risiko keamanan siber, kebocoran data, serta fraud berbasis teknologi. Selain itu, perbankan syariah juga memiliki karakteristik khusus berupa kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga muncul risiko tambahan yang dikenal sebagai sharia compliance risk. Kombinasi dari berbagai jenis risiko tersebut menuntut adanya sistem manajemen risiko yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Lebih lanjut, transformasi digital dalam perbankan syariah telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan efisiensi dan kualitas layanan kepada nasabah. Namun, di sisi lain, digitalisasi juga memperbesar potensi risiko yang harus dikelola secara efektif. Oleh karena itu, penerapan digital risk management menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Integrasi antara digital risk management dan sharia compliance menjadi solusi strategis dalam menghadapi kompleksitas risiko tersebut, karena mampu menggabungkan aspek teknologi dengan nilai-nilai syariah dalam satu kerangka kerja yang terpadu.

Hasil kajian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi integrasi manajemen risiko sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu penguatan tata kelola perusahaan (good corporate governance), kesiapan infrastruktur teknologi, kualitas sumber daya manusia, serta peran aktif lembaga pengawas seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selain itu, dukungan regulasi yang adaptif dan responsif

terhadap perkembangan teknologi juga menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem manajemen risiko yang efektif. Tanpa adanya dukungan dari aspek-aspek tersebut, integrasi manajemen risiko akan sulit untuk diimplementasikan secara optimal.

Di samping itu, penelitian ini menegaskan bahwa inovasi dalam manajemen risiko, seperti pemanfaatan teknologi artificial intelligence, big data, dan blockchain, memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko. Teknologi tersebut dapat membantu dalam proses identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko secara lebih cepat dan akurat. Namun demikian, penerapan teknologi tersebut harus tetap berada dalam koridor prinsip syariah agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap nilai-nilai yang menjadi dasar operasional perbankan syariah.

Selain memberikan manfaat, implementasi integrasi antara digital risk management dan sharia compliance juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas sistem, serta cepatnya perkembangan teknologi. Tantangan ini menuntut perbankan syariah untuk terus beradaptasi dan melakukan inovasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak yang terlibat, baik manajemen internal bank, regulator, maupun akademisi, dalam mendukung pengembangan sistem manajemen risiko yang lebih adaptif dan terintegrasi.

Secara keseluruhan, integrasi antara digital risk management dan sharia compliance merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam meningkatkan ketahanan dan daya saing perbankan syariah di era disrupsi teknologi. Dengan sistem manajemen risiko yang terintegrasi, perbankan syariah tidak hanya mampu mengelola risiko secara lebih efektif, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat kontribusinya terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi berbagai pihak terkait dalam mengembangkan manajemen risiko pada perbankan syariah di era digital.

Pertama, bagi pihak perbankan syariah, disarankan untuk meningkatkan investasi dalam pengembangan infrastruktur teknologi informasi, khususnya dalam sistem keamanan siber dan manajemen risiko berbasis digital. Penguatan sistem ini sangat penting untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman yang muncul akibat digitalisasi layanan keuangan. Selain itu, bank syariah juga perlu mengembangkan sistem early warning system yang mampu mendeteksi potensi risiko sejak dini.

Kedua, perbankan syariah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. SDM yang memiliki pemahaman yang baik terhadap teknologi dan prinsip syariah akan menjadi kunci utama dalam keberhasilan implementasi manajemen risiko yang terintegrasi. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi di bidang digital risk dan sharia compliance perlu menjadi prioritas.

Ketiga, bagi regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diharapkan dapat terus mengembangkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan stabilitas sistem keuangan. Regulasi yang fleksibel dan responsif akan memberikan ruang bagi perbankan syariah untuk berinovasi, sekaligus menjaga keamanan dan kepercayaan masyarakat.

Keempat, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) perlu diperkuat, tidak hanya dalam aspek pengawasan kepatuhan syariah, tetapi juga dalam memahami perkembangan teknologi yang mempengaruhi operasional perbankan. DPS diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang komprehensif terkait integrasi antara teknologi dan prinsip syariah.

Kelima, bagi akademisi dan peneliti, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait model integrasi manajemen risiko berbasis digital dan syariah, baik melalui pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan praktik manajemen risiko yang lebih inovatif dan aplikatif.

Keenam, perlu adanya peningkatan literasi keuangan dan digital di kalangan masyarakat agar nasabah lebih memahami risiko yang mungkin timbul dalam penggunaan layanan perbankan digital. Edukasi ini penting untuk meminimalkan potensi risiko yang berasal dari faktor eksternal, seperti kesalahan penggunaan atau kurangnya pemahaman terhadap teknologi.

Dengan adanya berbagai upaya tersebut, diharapkan perbankan syariah dapat mengelola risiko secara lebih efektif, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mampu bersaing di tengah perkembangan industri keuangan global yang semakin kompetitif dan berbasis teknologi.

Daftar Pustaka

- Akbar, C, Eril, Abdullah, M. W., & Awaluddin, M. (2022). Manajemen Risiko di Perbankan Syariah: Risk Management In Islamic Banking. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 51–56. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.230>
- Fachruddin, M. H. (2025). *Strategi manajemen risiko bank syariah dalam menghadapi transformasi digital*.
- Fikriah, N. L., Al Idrus, S., Maksum, I., Ningtyas, M. N., & Murdiansyah, I. (2023). *Upaya peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan penyusunan manajemen laporan keuangan dan kewirausahaan (business plan)*. <https://repository.uin-malang.ac.id/20784/>
- Maghfiro, N., & Budianto, E. W. H. (2024). Determinan Minat Menggunakan Layanan Digital Banking Syariah Pada Generasi Z di Kota Malang. *Jurnal Dimensi*, 13(2), 352–363. <https://repository.uin-malang.ac.id/21354/>
- Rahmawati, P. A., & Nisa, F. L. (2024). Analisis manajemen risiko pada bank syariah Indonesia. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 75–82.
- Rivanda, A. R. (2025). *Strategi pengelolaan risiko operasional pada bank umum syariah di Indonesia*.
- Sudarmanto, E., Yuliana, I., Wahyuni, N., Yusuf, S. R., & Zaki, A. (2024). Transformasi Digital dalam Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 645. <https://repository.uin-malang.ac.id/19648/>
- Susanti, K. H. (2024). Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah di Era Digital dalam Pertumbuhan Berkelanjutan. *Persya: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 13–19.